

Fakta-fakta soal

Pemberhentian Gus Yahya:

1. Status Jabatan Dicabut

- Gus Yahya resmi tidak lagi menjadi Ketua Umum PBNU per 26 November 2025, pukul 00.45 WIB.
- Tidak lagi memiliki wewenang, hak, atribut, fasilitas, maupun kewenangan bertindak atas nama PBNU.

2. Dasar Keputusan

Surat edaran PBNU ditandatangani Wakil Rais Aam Afifuddin Muhajir & Katib Aam Ahmad Tajul Mafakhir (25 November 2025). Merujuk aturan:

- Pasal 7 Ayat (4) Peraturan NU No. 10/2025 (Rapat).
- Pasal 8 huruf a-b Peraturan NU No. 13/2025 (Pemberhentian & PAW).
- Peraturan PBNU No. 01/X/2023 (Pedoman Pemberhentian & Pelimpahan Fungsi).

3. Rapat Syuriah PBNU

- Rapat Harian Syuriah PBNU: 29 Jumadil Ula 1447 H / 20 Nov 2025, pukul 17.00-20.00 WIB.
- Lokasi: Hotel Aston City Jakarta.
- Peserta: 37 dari 53 pengurus harian Syuriah.
- Dipimpin langsung Rais Aam KH Miftachul Akhyar.

4. Permintaan Mundur Sebelum Dipecat

- Rapat memberi tenggat 3 hari agar Gus Yahya mundur.
- Alasan pokok: dugaan keterkaitan dengan jaringan Zionisme internasional (mengacu pada risalah rapat).

Konflik-konflik di internal NU

- Muktamar Cipasung 1994: Sejumlah kelompok menolak kepemimpinan Gus Dur, menilai manajemen NU lemah, otoritis, dan sering berbenturan dengan pemerintah.
- Muktamar Lampung 2021: Muncul tuduhan intervensi Presiden Jokowi dalam pemilihan Ketua Umum PBNU, sebagaimana disampaikan Said Aqil Siradi.
- Konflik 2010: Penolakan terhadap pencalonan Hasyim Muzadi sebagai Rais Aam karena dinilai menyeret NU ke politik praktis dan merusak kepercayaan publik.

TERBELAHNYA
NAHDLATUL ULAMA

Disebut Tak Lagi Jabat Ketum Per 26 November, Gus Yahya Melawan

Kisruh di tubuh Nahdlatul Ulama (NU) mencapai titik didih setelah keputusan pemecatan Gus Yahya Cholil Staquf dari jabatan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Rabu (26/11/2025). Hal itu tertuang dalam Surat Edaran Nomor 4785/PB.02/A.II.10.01/99/11/2025 yang ditandatangani Wakil Rais Aam PBNU Afifuddin Muhajir dan Katib PBNU Ahmad Tajul Mafakhir, sehari sebelumnya. Kepemimpinan sementara kini berada di tangan Rais Aam PBNU, Miftachul Akhyar. Gus Yahya langsung merespon dan menolak tunduk pada surat tersebut. Dia menyebut pemecatan itu cacat prosedur. Salah satu standard yang disalahi, surat tersebut tidak ditandatangani oleh empat orang di Syuriah (pimpinan tertinggi) dan Tanfidziyah (badan pelaksana). Ia menegaskan tidak bisa dimundurkan kecuali lewat forum muktamar. Diketahui, desakan agar Yahya meletakkan jabatan mencuat usai Rapat Harian Syuriah PBNU di Jakarta, 20 November lalu. Sikap dan kebijakan Yahya dinilai bertentangan dengan nilai dan ajaran

NU, salah satunya karena Yahya dianggap memiliki relasi dengan kelompok Yahudi internasional. Pusaran konflik ini mengingatkan pada gejolak di internal NU era Cipayung. Ketika organisasi pernah tercerai-berai oleh manuver politik, saling klaim otoritas, hingga muncul dualisme kepemimpinan yang menghantui bertahun-tahun. Saat itu pemerintah hendak mendongkel Abdurrahman Wahid alias Gus Dur dari jabatan Ketua Umum PBNU periode 1984-1999 dengan alasan tata kelola dan gaya kepemimpinan Gus Dur. Dengan cerita berbeda, kini bayang-bayang sejarah itu seakan kembali menghampiri NU dengan taruhan jauh lebih besar. Akankah badai segera berlalu?

BACA HAL 11...



Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan terkait aktivitas bandara khusus PT IMIP atau IMIP Private Airport di Morowali, Sulawesi Tengah (Sulteng). Bahlil mengatakan Prabowo menginstruksikan kepada dirinya menegakkan aturan.

"Arahan Bapak Presiden kepada kami, sebagai Satgas dan sebagai Menteri ESDM adalah tegakkan aturan. Jangan pandang bulu, karena nggak boleh negara kalah dari apa yang terjadi yang kurang pas atau melanggar," kata Bahlil usai bertemu Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (26/11/2025).

Bahlil mengatakan bandara tersebut telah menjadi perhatian bagi Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH). Dia mengaku tidak ikut serta saat tim mengunjungi lapangan di Morowali.

"Kemarin Satgas PKH, saya kebetulan pada satu hari sebelumnya saya ikut mendampingi tim, dipimpin langsung oleh Pak Sjafrie (Menhan), saya ke Bangka Belitung dan setelah itu saya balik karena ada rapat dengan Bapak Presiden, jadi saya tidak ikut serta dalam tim yang turun di IMIP," katanya.

Bahlil mengaku masih menunggu laporan dari tim satgas terkait ada tidaknya aktivitas ilegal di sekitar bandara khusus tersebut. Meski begitu, dia menegaskan pemerintah akan menindak jika ditemukan pelanggaran.

"Sampai dengan sekarang kita tunggu laporan dari tim. Tapi saya harus mengatakan bahwa siapa pun yang melanggar terkait dengan tambang ilegal ataupun menambang di luar wilayah yang ada izinnya seperti BPKH (Balai Pemantapan Kawasan Hutan) ataupun menambang di area yang ada nikelnya atau ada tambangnya tapi tidak ada izinnya, tetap akan diproses secara hukum," katanya.

Sebelumnya, Bandara IMIP menjadi sorotan usai disebut beroperasi tanpa petugas dari negara. Hal itu disebut oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang mendampingi Menhan Sjafrie Sjamsoeddin dalam kunjungan di Bandara IMIP. Satgas PKH menyebut Bandara IMIP beroperasi tanpa adanya otoritas negara.

"Ternyata di Indonesia ada bandara yang tanpa ada otoritas negara. Bandara itu ada di kawasan industri Morowali atau PT IMIP. Tanpa adanya pihak keamanan, tanpa adanya pihak bea cukai, dan tanpa adanya pihak imigrasi," kata Satgas PKH dalam unggahan di akun Instagramnya @satgaspkhofficial, dikutip Rabu (26/11).

Satgas PKH menyebut Menhan sempat merasa ada yang aneh ketika tiba di Bandara PT IMIP. Aktivitas bandara dianggap rawan karena

KISRUH BANDARA IMIP MOROWALI TANPA PENGAWASAN BEA CUKAI-IMIGRASI

Publik dibikin heboh keberadaan Bandara Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP). Bukan karena nama bandaranya yang tak lazim atau sulit diingat. Tapi memang banyak yang aneh dari bandara ini. Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin, misalnya, mengaku heran dengan Bandara IMIP yang dikunjunginya saat meninjau latihan TNI pada 19 November 2025. Lantaran, bandara tersebut tidak memiliki kehadiran Bea Cukai maupun Imigrasi. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengamini kondisi itu.



Foto-foto Bandara Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP)

pesawat bebas keluar masuk tanpa adanya pengawasan.

"Ketika Menteri Pertahanan dan Satgas PKH tiba di Bandara PT IMIP, merasa ada yang aneh. Banyak kerawanan terhadap bandara

tersebut. Namun tidak ada otoritas negara, bebas keluar masuk tanpa adanya pengawasan ketat. Serasa ada negara di dalam negara. Semua crew yang berada di Bandara PT IMIP bukan dari otoritas negara," ucapnya.

Pengelola Buka Suara: Terdaftar di Kemenhub

PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) buka-bukaan soal status Bandara IMIP. Direktur Komunikasi PT IMIP, Emilia Bassar, menyatakan Bandara IMIP adalah bandara khusus yang telah terdaftar di Kementerian Perhubungan sesuai dengan UU Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan.

"Bandara Khusus IMIP terdaftar di Kemenhub yang pengelolaannya diatur dalam UU Nomor 1/2009 tentang Penerbangan," kata Emilia singkat, Rabu (26/11/2025).

Emilia hanya memberikan jawaban singkat soal hal tersebut, ketika disinggung soal perangkat negara di dalam Bandara IMIP, dia enggan berkomentar lebih lanjut. Dalam UU Penerbangan yang diungkap Emilia, bandar udara khusus diatur dalam satu bagian tersendiri, mulai dari pasal 247 hingga 252.

Pada pasal 247 disebutkan dalam

rangka menunjang kegiatan tertentu, Pemerintah, pemerintah daerah, atau badan hukum Indonesia dapat membangun bandar udara khusus setelah mendapat izin pembangunan dari Menteri.

Di pasal yang sama, disebutkan izin pembangunan bandar udara khusus harus memenuhi persyaratan berupa bukti kepemilikan dan penguasaan lahan, kelengkapan rekomendasi yang diberikan oleh pemerintah daerah setempat, rancangan teknik terinci fasilitas pokok, dan kelestarian lingkungan.

"Ketentuan keselamatan dan keamanan penerbangan pada bandar udara khusus berlaku sebagaimana ketentuan pada bandar udara," bunyi pasal 247 ayat 3.

Sementara itu, pada pasal 248 dijelaskan pengawasan dan pengendalian pengoperasian bandar udara khusus dilakukan oleh otoritas bandar udara terdekat yang ditetapkan oleh Menteri.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan ke depannya Kemenkeu akan melihat perkembangan apakah bandara tersebut butuh pengawasan Bea Cukai atau tidak. Ia lalu menyinggung adanya izin khusus yang diberikan kepada bandara tersebut yang bukan menjadi kewenangan Kemenkeu. (tin,voi,ist/dya)

Tentang Bandara IMIP

- Bandara terintegrasi dengan kawasan industri besar PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Jl. Trans Sulawesi, Fatufia, Morowali, Sulawesi Tengah.
- Fungsi bandara:** logistik industri, termasuk pengangkutan pekerja dan material.
- Data Ditjen Perhubungan Udara:** Bandara IMIP berstatus bandara privat swasta, kelas 4B, berada di bawah Otoritas Bandara Wilayah V Makassar.
- Status operasi:** non-kelas, operasi khusus untuk penggunaan domestik.
- Kode bandara:**
 - ICAO: WAMP
 - IATA: MWS

Aktivitas 2024:

- 534 pergerakan pesawat
- 51.800 penumpang

Spesifikasi landasan:

- Panjang 1.890 m, lebar 30 m

PCN 68/F/C/X/T

- Apron: ukuran 96 × 83 m, PCN sama (68/F/C/X/T)
- Runway strip: 2.010 × 300 m

Kemudian disebutkan juga di pasal 249 bahwa bandar udara khusus dilarang melayani penerbangan langsung dari dan ke luar negeri kecuali dalam keadaan tertentu dan bersifat sementara, setelah memperoleh izin dari Menteri.

Bandar udara khusus juga dilarang digunakan untuk kepentingan umum. Kecuali dalam keadaan tertentu dan harus dengan izin Menteri, operasional secara umumnya juga bersifat sementara. Hal ini diatur di pasal 250. (wid,dtc/dya)

LAPAS OVER KAPASITAS, PIDANA MINIMUM KASUS NARKOTIKA DIUSULKAN DIHAPUS

Pemerintah usulkan hapus hukuman pidana minimum khusus untuk kasus narkoba. Tujuannya untuk mengatasi masalah kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan (Lapas). Ketentuan ini tidak berlaku untuk kasus korupsi, terorisme, dan pelanggaran HAM berat.

Komisi III DPR RI bersama pemerintah melalui Kementerian Hukum mulai membahas Rancangan Undang-Undang tentang Penyesuaian Pidana yang terdiri atas sembilan pasal.

Dalam rapatnya, pemerintah mengusulkan penghapusan ketentuan pidana minimum khusus dalam berbagai undang-undang di luar KUHP, terutama untuk kasus narkoba. Langkah ini bertujuan untuk mengatasi masalah kelebihan kapasitas (overcrowding) di Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas yang 70 persen penghuninya merupakan narapidana kasus narkoba.

Usulan ini disampaikan oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham), Edward Omar Sharif Hiariej atau yang akrab disapa Eddy, dalam pembahasan RUU tentang Penyesuaian Pidana bersama Komisi III DPR RI, Rabu (26/11/2025).

"Mengapa pidana minimum dihapus? Karena ini yang menyebabkan overcrowding. Padahal, barang buktinya kadang hanya 0,2 gram, tapi harus mendekam 4 tahun karena ada ancaman minimumnya," jelas Eddy.

Dalam RUU ini, pidana minimum akan dihapus dan diserahkan pada pertimbangan hakim, sementara pidana maksimum tetap berlaku. Namun, Eddy menegaskan penghapusan ini tidak berlaku untuk empat tindak pidana berat: pelanggaran HAM berat, terorisme, pencucian uang, dan korupsi.

Kurungan Dikonversi ke Denda

Selanjutnya, RUU Penyesuaian Pidana mengatur agar pidana kurungan disesuaikan atau dikonversi menjadi pidana denda.

Dia menjelaskan bahwa hal itu disesuaikan karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru sudah tidak lagi mengenal pidana kurungan. Untuk itu, menurut dia, belasan ribu peraturan daerah yang memiliki pidana kurungan dikonversi dengan pidana denda.

"Dengan ketentuan jika Perda itu dia pidana kurungan tunggal, maka dikonversi menjadi denda," kata Eddy saat rapat panitia kerja dengan Komisi III DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

Selain itu, dia mengatakan bahwa jika pidana itu pidana denda tunggal, maka pidana denda tunggal diubah berdasarkan subjek hukum.



Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej (Eddy)

Dalam RUU tersebut, menurut dia, diatur juga kategori untuk denda sesuai dengan KUHP baru.

"Jika pelakunya orang perseorangan, maka paling banyak Kategori II, berarti 10 juta. Tapi kalau pelakunya korporasi, itu dirubah menjadi paling banyak Kategori V. Kategori V itu sekitar 500 juta," kata dia.

Selain itu, kategori denda juga bisa dikenakan didasarkan dengan keuntungan finansial. Jika pidana dilakukan perseorangan maka kategorinya lebih rendah dari pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Kemudian, dia menyebut jika pidana denda bersama-sama dengan pidana kurungan, berarti hal itu adalah pidana kumulasi. Untuk itu, pidana

196 DIM Rampung Dibahas, Lanjut Pekan Depan

WAKIL Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej, menyebut sudah 196 daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU Penyesuaian Pidana yang dibahas bersama Panitia Kerja (Panja DPR, hari ini, Rabu (26/11/2025).

"Sampai dengan DIM 196 ya. Berarti masih kurang sekitar seratus lebih lagi. (Dilanjut lagi) Senin," kata Eddy kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (26/11/2025).

Sebelumnya, Eddy telah memaparkan struktur dan ruang lingkup RUU Penyesuaian Pidana dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI. Ia menjelaskan bahwa rancangan aturan ini disusun untuk memastikan seluruh regulasi pidana selaras dengan KUHP baru yang akan berlaku pada 2 Januari 2026.

RUU ini, kata Eddy, mencakup tiga bab besar yang fokus pada penyesuaian aturan pidana di berbagai tingkatan peraturan perundang-undangan.

"Secara garis besar RUU ini berisi

3 bab. Bab pertama yakni penyesuaian pidana dalam undang-undang di luar KUHP," kata Eddy di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (24/11/2025).

Pada bab pertama tersebut, pemerintah mengusulkan empat penyesuaian pokok: penghapusan pidana kurungan sebagai pidana utama, penyesuaian kategori pidana denda agar mengikuti Buku I KUHP, penyalarsan ancaman pidana penjara untuk menghindari disparitas, serta penataan kembali pidana tambahan agar sejalan dengan sistem sanksi dalam KUHP.

"Penyesuaian dilakukan untuk memberikan satu standar pemidanaan yang konsisten secara nasional," ujarnya.

Bab kedua membahas penyesuaian pidana dalam peraturan daerah. Bagian ini memuat pembatasan kewenangan daerah dalam menetapkan sanksi pidana.

Menurut Eddy, peraturan daerah hanya boleh memuat pidana denda hingga kategori ketiga sesuai KUHP,

kurungan dihapus dan pidana denda disesuaikan berdasarkan ketentuan pidana denda tunggal.

Untuk pidana penjara, dia mengatakan bahwa jika pidana penjara bersama-sama dengan pidana denda, maka ketentuan konversinya adalah pidana kumulatif diubah menjadi kumulatif alternatif.

Saat ini, kata dia, banyak undang-undang di luar KUHP yang selalu memberikan pidana penjara dan pidana denda. Hal itu, kata dia, akan diubah dalam RUU Penyesuaian Pidana menjadi "pidana penjara dan/atau denda". (tin,ant/dya)

PENYESUAIAN SANKSI UNTUK MENYELARASKAN HUKUM DENGAN KUHP BARU

- **Penghapusan Pidana Kurungan:** Istilah "pidana kurungan" yang ada di ribuan Peraturan Daerah (Perda) akan dikonversi menjadi pidana denda yang diklasifikasikan ke dalam 8 kategori.

Sanksi Kumulatif Jadi Alternatif: Pola pemidanaan kumulatif (penjara dan denda) akan diubah menjadi kumulatif alternatif (penjara dan/atau denda). Ini memberikan keleluasaan bagi hakim untuk memilih sanksi yang paling tepat, dengan tetap mengacu pada pedoman pemidanaan di KUHP baru.

Penghapusan pidana minimum kasus narkoba: pidana minimum akan dihapus dan diserahkan pada pertimbangan hakim, sementara pidana maksimum tetap berlaku. Penghapusan ini tidak berlaku untuk empat tindak pidana berat: pelanggaran HAM berat, terorisme, pencucian uang, dan korupsi.

sementara seluruh ketentuan pidana kurungan dalam perda harus dihapus.

Ia menambahkan, perda hanya bisa menetapkan pidana untuk norma administratif yang benar-benar bersifat lokal. "Ketentuan ini menjaga proporsionalitas pemidanaan, dan mencegah over regulation," jelas Eddy.

Bab terakhir berisi penyempurnaan teknis terhadap sejumlah pasal KUHP yang dinilai masih membutuhkan perbaikan redaksi, kejelasan norma, dan harmonisasi ancaman pidana.

Penyempurnaan tersebut diperlukan untuk memastikan tidak ada lagi ketentuan minimum khusus atau rumusan pidana kumulatif yang bertentangan dengan sistem baru.

"Perubahan ini diperlukan untuk menjamin penetapan KUHP berlangsung secara efektif dan tidak menimbulkan multitafsir," tuturnya. (ini,ist/dya)

Pemkab Madiun Tegaskan Investasi Tertib Aturan, Kemitraan UMKM Diperkuat Lewat Anugerah Kepatuhan 2025

MADIUN — Pemerintah Kabupaten Madiun kembali meneguhkan komitmennya untuk menjadikan daerah ini sebagai rumah investasi yang aman, tertib, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Hal tersebut diwujudkan melalui Anugerah Kepatuhan Investasi dan Kemitraan Pelaku Usaha Besar dan U M K M Tahun 2025 yang diselenggarakan di Hotel Mercure Madiun, Rabu (26/11/2025).

Acara tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Madiun H. Hari Wuryanto, jajaran pimpinan OPD, asosiasi pelaku usaha, perbankan daerah, serta para penerima anugerah dari berbagai sektor termasuk UMKM.

Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa kepatuhan terhadap regulasi adalah fondasi utama terbangunnya iklim investasi yang kondusif. Pemerintah, kata dia, hadir bukan sekadar sebagai regulatori, tetapi sebagai mitra bagi dunia usaha.

“Berinvestasi di Madiun itu aman dan kondusif selama mematuhi aturan. Kepatuhan ini bukan hanya kewajiban administratif, tetapi bagian dari tanggung jawab agar manfaat usaha dapat dirasakan masyarakat,” tegasnya.

Menurutnya, melalui anugerah ini pemerintah daerah menunjukkan keberpihakan pada pelaku usaha yang



profesional dan patuh regulasi. Hal itu sekaligus menepis berbagai isu miring yang kadang muncul dari pihak yang tidak memahami prosedur investasi.

Kepala DPMPTSP Kabupaten Madiun, Anang Sulistijono, menjelaskan bahwa penghargaan diberikan berdasarkan penilaian menyeluruh terhadap kepatuhan pelaku usaha, baik terkait perizinan dasar maupun kewajiban pelaporan investasi melalui sistem LKPM.

“Banyak indikator yang harus dipenuhi. Bila dari sepuluh indikator baru terpenuhi delapan, maka tugas kami adalah mendampingi hingga semuanya lengkap. Kepatuhan ini bukan untuk mempersulit, tetapi untuk kepastian usaha,” papar Anang.

Kemitraan untuk Pertumbuhan Ekonomi Berkeadilan

Sebagai wujud percepatan perekonomian daerah, kegiatan tersebut juga dirangkai dengan penandatanganan empat kerja sama kemitraan yang menghubungkan pelaku usaha besar dengan UMKM dan pelaku usaha mikro berbasis komunitas.

Bupati menyampaikan bahwa sinergi tersebut merupakan langkah strategis Pemkab dalam mendorong pemerataan manfaat investasi hingga ke tingkat akar rumput.

“Kemitraan ini memastikan UMKM tidak hanya menjadi penonton. Mereka turut naik kelas, memiliki akses pasar, dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya. Kinerja investasi Kabupaten Madiun menunjukkan tren yang sangat positif. Hingga Triwulan III 2025, realisasi investasi telah mencapai Rp1,28 triliun atau 76% dari target Rp2,5 triliun

Dengan tambahan beberapa proyek besar yang sedang berjalan, Pemkab optimistis realisasi tahun ini dapat melampaui target.

Sementara untuk 2026, target investasi ditingkatkan menjadi Rp3 triliun dengan dukungan kawasan industri dan kawasan ekspor-impor yang masih memiliki lahan siap investasi lebih dari 330 hektare.

“Kami membuka peluang selebar-lebarnya. Semua proses kami permudah, tapi tetap dalam aturan yang berlaku,” ujar Bupati.

Pemkab menegaskan sikap konsisten dalam pemenuhan regulasi

investasi. Pendampingan akan terus ditingkatkan, sekaligus mendorong pelaku usaha untuk membangun kemitraan yang luas dan saling menguntungkan. (wit,adv/dya)

PENERIMA ANUGERAH KEPATUHAN INVESTASI 2025

Kategori PMA

1. PT Global Way Indonesia — Terbaik I
2. PT Dwi Prima Sentosa — Terbaik II
3. PT Sintec Industri Indonesia — Terbaik III

Kategori PMDN

1. PT Sumber Alfaria Trijaya — Terbaik I
2. PT INKA Multi Solusi — Terbaik II
3. PT Gunung Mas Bersinar — Terbaik III

Kategori Kesehatan

1. RSUD Dolopo — Terbaik I
2. Mila Beauty Clinic — Terbaik II
3. Apotek Arvi Farma — Terbaik III

Kategori Perumahan

1. PT Bumi Inti Prakarsa — Terbaik I
2. PT Maris Bangun Nusantara — Terbaik II
3. PT Rejeki Tambah Barokah — Terbaik III

Kategori Pariwisata

1. PT Periska Multi Usaha — Terbaik I
2. RM Icha Orient Tarzan — Terbaik II
3. RM Kampoeng Sawah — Terbaik III

Kemitraan Pelaku Usaha Besar dengan UMKM dan Pelaku Usaha Mikro Berbasis Komunitas:

1. CV Alfa Jaya Utama dan UD Karya Mandiri Kolaborasi penyediaan beras rendah karbon, mendukung pangan sehat dan ramah lingkungan.
2. PT Periska Multi Usaha dan UD Karya Mandiri Penguatan pasar beras rendah karbon melalui jaringan usaha yang lebih luas.
3. PT INKA Multi Solusi dan Perumda Tirta Dharma Purabaya Produksi dan distribusi AMDK Yoiki sebagai produk kebanggaan daerah.
4. PT Semesta Mitra Sejahtera dan JUMADI (peternak perorangan) Pengembangan peternakan rakyat menuju usaha yang kompetitif dan berkelanjutan.

Cari Bukti Korupsi Monumen Reog Ponorogo, KPK Geledah Kantor di Surabaya

SURABAYA—Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor PT Widya Satria, Rabu (26/11/2025). Perusahaan di Surabaya, pemenang tender proyek pembangunan Monumen Reog Ponorogo yang diduga sarat praktik korupsi.

Pengegeledahan dilakukan di kantor yang berlokasi di Jalan Ketintang Permai Blok BB 20, Surabaya. Informasi ini dibenarkan Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo.

“Benar, terkait perkara Ponorogo,” kata Budi saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (26/11/2025) sore.

Budi belum menjelaskan hasil pengegeledahan maupun barang bukti yang diamankan. Ia menyebut rincian akan disampaikan setelah penyidik menyusun laporan lengkap.

Sebelumnya, KPK menyatakan sedang mendalami dugaan korupsi proyek pembangunan Monumen Reog Ponorogo.

“Tim sedang melakukan pendalaman. (Kasus) baru,” ujar Budi melalui keterangan tertulis, Rabu (12/11/2025).

Kasus ini mencuat setelah adanya bukti petunjuk dari pengembangan perkara suap jual beli jabatan, fee

proyek RSUD dr. Harjono Ponorogo, dan gratifikasi yang melibatkan Bupati Ponorogo nonaktif Sugiri Sukoco (SUG).

Sugiri ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Jumat (7/11/2025) dan ditetapkan sebagai tersangka sehari setelahnya, Sabtu (8/11/2025).

“Peristiwa tertangkap tangan sering kali menjadi pintu masuk bagi KPK untuk menelusuri dan melacak apakah praktik-praktik dugaan tindak pidana korupsi juga terjadi pada sektor-sektor lainnya di wilayah tersebut,” kata Budi.

Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan barang bukti awal berupa dugaan suap dan gratifikasi senilai total Rp2,6 miliar. Dana itu berasal dari tiga klaster perkara: Rp900 juta dari suap jual beli jabatan, Rp1,4 miliar dari fee proyek RSUD dr. Harjono, dan Rp300 juta berupa gratifikasi.

Setelah pemeriksaan, empat orang ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah Bupati Ponorogo Sugiri Sukoco (SUG); Sekretaris Daerah Ponorogo Agus Pramono (AGP); Direktur RSUD dr. Harjono Ponorogo Yunus Mahatma (YUM) dan Rekanan RSUD Ponorogo, Sucipto (SC). (ant,wid/dya)

Pemkab Pasuruan Optimalkan Pemanfaatan DBHCHT 2025 untuk Penguatan Kesejahteraan Masyarakat

PASURUAN - Pemerintah Kabupaten Pasuruan memastikan pelaksanaan program Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Tahun Anggaran 2025 berjalan secara terencana, terukur, serta berorientasi langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan tersebut ditegaskan oleh Bupati Pasuruan, H. Mochamad Rusdi Sutejo, sebagai komitmen pemerintah daerah dalam memastikan pemanfaatan DBHCHT sesuai ketentuan regulasi serta memberikan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat secara nyata.

Bupati Rusdi Sutejo menyampaikan bahwa pemerintah daerah menempatkan DBHCHT sebagai salah satu instrumen pendukung pembangunan sosial-ekonomi masyarakat, khususnya dalam memperkuat daya dukung pelayanan publik dan stabilitas ekonomi daerah. Beliau menegaskan bahwa setiap alokasi dana harus dikelola secara akuntabel dan diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat. "DBHCHT harus memberikan dampak nyata. Fokus kami adalah memastikan manfaatnya dirasakan rakyat, terutama pada sektor yang mendukung kesejahteraan sosial dan ekonomi," ujarnya.

Dalam kerangka pelaksanaan tahun anggaran 2025, Pemkab Pasuruan mengarahkan sebagian besar DBHCHT untuk mendukung peningkatan infrastruktur pendukung mobilitas ekonomi. Melalui Dinas Bina Marga, sejumlah kegiatan pemeliharaan dan peningkatan



DBHCHT Kab Pasuruan 2025 untuk perbaikan jalan dan jembatan. (Foto-foto:Martin)

kualitas jalan dilaksanakan pada ruas-ruas strategis yang berfungsi sebagai jalur distribusi barang, akses antarwilayah, dan penggerak ekonomi lokal. Pemerintah daerah menilai bahwa pemeliharaan infrastruktur menjadi bagian penting dalam menjaga kelancaran aktivitas ekonomi serta meningkatkan efisiensi produktivitas masyarakat.

Selain mendukung infrastruktur, pemerintah daerah juga memanfaatkan DBHCHT untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui kegiatan pelatihan dan pembekalan keterampilan masyarakat pada berbagai sektor. Sekretariat DBHCHT Kabupaten Pasuruan, Kokok Adi Prayogo, menjelaskan bahwa pelaksanaan program dilaksanakan secara lintas perangkat daerah, meliputi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Dinas

Ketenagakerjaan. Melalui kolaborasi tersebut, berbagai pelatihan vokasi dirancang untuk meningkatkan kompetensi masyarakat, membuka peluang usaha, serta memperkuat daya saing tenaga kerja di wilayah Kabupaten Pasuruan.

Pada aspek perlindungan sosial, Pemkab Pasuruan menetapkan kebijakan penjaminan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan bagi 171 ribu pekerja rentan yang tersebar di berbagai wilayah. Program ini ditujukan untuk memberikan kepastian perlindungan bagi pekerja, khususnya pada sektor informal yang memiliki risiko sosial-ekonomi tinggi. Selain itu, pemerintah daerah juga melanjutkan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) berbasis DBHCHT kepada 67.677 penerima manfaat. Program bantuan tersebut menjadi salah satu instrumen pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat, mempertahankan daya beli, serta

mengurangi potensi kerentanan sosial.

Agar seluruh kegiatan berjalan sesuai jadwal, Bupati Pasuruan memberikan instruksi tegas kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pelaksana agar memastikan kecepatan pelaksanaan, akurasi sasaran, serta transparansi pengelolaan anggaran. "Anggaran telah ditetapkan. Pelaksanaan program harus segera dilakukan secara tertib, akuntabel, dan tepat sasaran. Tidak boleh ada penundaan yang dapat menghambat manfaat bagi masyarakat," tegasnya.

Melalui rangkaian kegiatan yang terstruktur dan berorientasi hasil tersebut, Pemkab Pasuruan menargetkan pemanfaatan DBHCHT 2025 mampu memperkuat indikator pembangunan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendukung keberlanjutan stabilitas ekonomi di Kabupaten Pasuruan. Pemerintah daerah memastikan seluruh program tetap berada dalam koridor regulasi dan tata kelola keuangan yang baik, sehingga manfaat DBHCHT dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat. (adv)



Pelanggaran TKA: Live hingga Jual Soal, Siswa-Pengawas Terlibat

JAKARTA- Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti memaparkan hasil monitoring Tes Kemampuan Akademik (TKA).

Ia mengungkapkan, pihaknya menemukan beberapa aktivitas pelanggaran, mulai dari live streaming saat pengerjaan hingga aktivitas menjual soal.

Mu'ti menyebut hasil monitoring itu saat sesi Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang disiarkan secara daring melalui YouTube di Jakarta Pusat pada Rabu.

"Pelaksanaan tahun ini juga tidak

terlepas dari pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, baik oleh peserta tes maupun pengawas atau teknisi," kata Mendikdasmen, Rabu (26/11/2025).

Dalam paparannya, pihaknya menemukan sebanyak empat kasus terkait penggunaan gawai saat pelaksanaan TKA, delapan kasus terkait live streaming pada saat pengerjaan TKA, dan tiga kasus terkait kegiatan menjual soal TKA.

Sementara terkait pelanggaran pembocoran soal TKA melalui media sosial, Mu'ti memaparkan sebanyak sebelas kasus terkait usaha pembocoran soal TKA melalui

platform Tiktok, 28 kasus terkait usaha pembocoran soal TKA melalui WhatsApp group, dan satu kasus terkait usaha pembocoran soal TKA melalui platform X.

Ia menambahkan, keseluruhan aktivitas pelanggaran tersebut dilakukan oleh murid yang menjadi peserta TKA.

"Untuk itu, Kemendikdasmen akan menindak tegas dan tidak menoleransi praktik-praktik kecurangan yang dilakukan dengan memberikan sanksi sesuai dengan pelanggarannya. Kami



Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti

akan menindak tegas setiap bentuk pelanggaran sekecil apapun guna menjaga integritas dan keadilan dalam pelaksanaan TKA," tegas Mu'ti. (gus,ant/dya)

Penilaian DPRD: Aset Kota Malang Belum Optimal Sumbang PAD

Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnangani Sirraduhita, Rabu (26/11/2025).
(Santi/Lentera)



"Tujuannya agar pelayanan masyarakat jangan sampai ketinggalan walaupun transfer keuangan daerah itu berkurang," ujar Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnangani Sirraduhita, ditemui usai paripurna penyampaian laporan hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun Anggaran 2026, Rabu (26/11/2025).

Ditegaskannya, salah satu langkah penting adalah digitalisasi penuh data dan transaksi terkait aset daerah, pajak, dan retribusi. Amithya menilai digitalisasi dapat membantu pemerintah melakukan penelusuran (tracking) atas potensi pendapatan, terutama pada sektor retribusi pasar.

"Misalnya terkait retribusi pasar,

itu berapa dapatnya, apakah betul-betul sesuai dengan kajian. Kemudian kalau ada lost-nya, itu bisa ketahuan," katanya.

Terkait aset daerah, perempuan yang akrab dengan sapaan Mia, ini menilai keterbukaan informasi sangat diperlukan. Dengan data aset yang dapat diakses publik, masyarakat dapat mengetahui peluang pemanfaatan aset yang tersedia. Hal tersebut juga membuka kesempatan bagi pihak luar yang ingin menyewa atau berinvestasi di Kota Malang.

"Kalau aset itu transparan, masyarakat bisa mengakses, tahu aset mana yang sebenarnya bisa jadi kesempatan untuk masyarakat Kota Malang sendiri. Atau kalau bisa diakses orang luar yang ingin menyewa atau berinvestasi, kita bisa memanfaatkan aset itu," jelasnya.

Mia menekankan, digitalisasi dan transparansi merupakan langkah penting mengingat kondisi keuangan daerah saat ini mengharuskan pemerintah "berdiri di atas kaki sendiri". Ditegaskannya, pengurangan dana transfer ke daerah (TKD) tidak boleh membuat pemerintah daerah

berhenti berupaya meningkatkan pendapatan.

Sebelumnya, laporan hasil Banggar DPRD Kota Malang yang disampaikan oleh Ketua Komisi B, Bayu Rekso Aji, menyoroti pengelolaan BMD yang belum optimal. Dalam pembahasan APBD 2026, Banggar mencatat adanya kenaikan target PAD sebesar Rp400 juta, dari Rp1.062.550.166.326 menjadi Rp1.062.950.166.326.

Namun demikian, Banggar menilai optimalisasi PAD dari sektor aset daerah masih menghadapi kendala besar. Permasalahan utama adalah ketiadaan sistem digital terintegrasi yang dapat menampilkan data aset secara terbuka dan mudah diakses publik.

Banggar juga merekomendasikan percepatan pembangunan Digital Asset Management System sebagai prasyarat penting pengawasan dan transparansi pengelolaan aset daerah. Sistem tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pemanfaatan BMD sehingga kontribusinya terhadap PAD dapat lebih optimal. (Santi/Dya)

MALANG- DPRD Kota Malang menilai pengelolaan aset daerah belum optimal dalam menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah Kota (Pemkot) pun diminta melakukan digitalisasi total data aset. Langkah ini sebagai upaya meningkatkan transparansi, pengawasan, dan efektivitas pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD).

Jelang Akhir Tahun, Masih Ada 658 Rumah Tak Layak Huni di Kota Batu

BATU - Pemerintah Kota (Pemkot) Batu terus mempercepat program penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Berdasarkan data terbaru, terdapat 658 unit RTLH yang belum menerima penanganan meski alokasi anggaran telah digelontorkan secara bertahap. Hal tersebut juga menjadi pekerjaan rumah bagi Pemkot Batu menjelang akhir 2025 ini.

Wakil Wali Kota Batu, Heli Suyanto, menyampaikan jumlah RTLH itu mencerminkan kebutuhan mendesak warga.

"Ada 658 RTLH yang harus segera mendapatkan intervensi pemerintah. Ini bukan sekadar data, tetapi wujud kebutuhan masyarakat yang wajib kami jawab," ujar Heli, dikutip pada Rabu (26/11/2025).

Pada tahun ini, menurutnya Pemkot melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) menargetkan perbaikan 152 unit RTLH. Anggaran yang disiapkan mencapai Rp4,5 miliar, meningkat dari

alokasi awal sebesar Rp2 miliar.

"Tambahan anggaran sebesar Rp1,5 miliar juga sudah diberikan di tengah pelaksanaan program," katanya.

Heli menjelaskan, pembiayaan program RTLH berasal dari APBD dan APBN. Sebagian dana dialokasikan untuk rumah warga yang tak layak huni akibat terdampak bencana. Skema bantuan renovasi tetap menggunakan pola yang sama, yakni Rp30 juta setiap unit.

"Rinciannya sama. Jadi Rp25,5 juta untuk pembelian material dan Rp4,5 juta untuk ongkos tukang. Pengerjaannya dilakukan secara swadaya oleh warga bersama pemerintah desa," jelas Heli.

Sebagai upaya mempercepat pemenuhan hunian layak, Pemkot Batu juga menerapkan insentif fiskal bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Pemerintah membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta

retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Perizinan Berusaha Gedung (PBG).

"Kebijakan ini telah dituangkan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2025, sebagai bukti konkret komitmen pemerintah untuk mempermudah warga memperoleh rumah layak," kata Heli.

Di luar program penanganan RTLH, Heli menilai penyediaan hunian baru di Kota Batu memiliki tantangan tersendiri. Ia menyebut keterbatasan lahan, tingginya harga tanah, serta tekanan pertumbuhan kawasan wisata sebagai faktor yang memengaruhi arah kebijakan perumahan di daerah tersebut.

Menurutnya, kebijakan perumahan harus tetap disesuaikan dengan tata ruang dan daya dukung

Ilustrasi: Wakil Wali Kota Batu, Heli Suyanto, meninjau salah satu rumah tidak layak huni di Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji. (dok. Prokopim Kota Batu)



lingkungan. "Kebijakan perumahan bukan hanya membangun rumah. Kita memastikan tiap pembangunan tetap selaras dengan daya dukung lingkungan dan tata ruang," paparnya. (Santi/Dya)

Situbondo Bakal Punya Bandara: KHR As'ad Syamsul Arifin Jadi Nama Resminya

SITUBONDO - Kabupaten Situbondo dalam waktu dekat bakal memiliki bandara udara. Bandara yang kini dalam proses pembangunan itu berlokasi di kawasan Pantai Banongan, Desa Wringin, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur.

Istimewanya, bandara tersebut akan diberi nama dari tokoh ulama sekaligus Pahlawan Nasional asal Situbondo, Kiai Haji Raden (KHR) As'ad Syamsul Arifin. Bandara Kasa, begitu nanti disebutnya.

Bupati Situbondo, Yusuf Rio Wahyu Prayogo saat meninjau lokasi pembangunan bandara di Banongan menyampaikan, pihaknya meminta doa dari seluruh warga agar pembangunan Bandar Kasa bisa berjalan lancar dan menjadi berkah bagi masyarakat.

"Bandara ini akan kita beri nama Bandara KHR As'ad Syamsul Arifin atau Bandara Kasa. Beliau salah satu Pahlawan Nasional asal Situbondo, pendiri Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, Situbondo," ujar Bupati Situbondo, Yusuf Rio Wahyu Prayogo, Rabu (26/11/2025).

Dia juga menyampaikan dalam pembangunan Bandara Kasa itu, Pemkab Situbondo menghibahkan lahan tanah seluas 306 hektare kepada



Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo bersama pejabat pertahanan saat meninjau lokasi pembangunan Bandara KHR As'ad Syamsul Arifin di kawasan pantai Banongan Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo, Rabu (26/11/2025). (Foto: ist)

Kementerian Pertahanan (Kemenhan) Republik Indonesia untuk dijadikan lokasi kegiatan pertahanan negara.

"Kami sudah berkoordinasi dan berkunjung ke Kemenhan RI dan meminta agar landasan pacu atau runway di Bandara Kiai As'ad yang direncanakan 2.000 meter ditambah menjadi 2.500 meter agar pesawat jenis boeing bisa masuk, pesawat presiden bisa masuk. Alhamdulillah disetujui," ujar bupati yang juga alumni Fisipol Universitas Jember ini.

Menurutnya, dengan penambahan landasan pacu menjadi 2.500 meter, ke depan bandara bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat Situbondo berupa pesawat komersial. Sehingga jenis Boeing maupun Airbus bisa mendarat di Bandara Kiai As'ad.

"Ke depan tidak hanya digunakan untuk keperluan bandara militer ya, tetapi juga bisa digunakan oleh masyarakat yang akan bepergian jauh, atau mau menunaikan ibadah

umrah, bisa lewat bandara ini," terangnya.

Agar pembangunan bandara lancar dan memberikan manfaat untuk kepentingan umum, Bupati Rio berencana akan menggelar pengajian dan tasyakuran di lokasi pembangunan Bandara Kiai As'ad Syamsul Arifin bersama tokoh ulama setempat.

Seperti diketahui, pada 12 November 2025, telah dibuat nota kesepakatan antara Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo bersama Direktur Fasilitas dan Jasa Ditjen Kuathan Kemenhan, Brigjen TNI Dwi Hariyono di Pendopo Kabupaten Situbondo. Ini terkait hibah lahan tanah 306 hektare di Perkebunan Banongan, Kecamatan Asembagus tersebut.

Bandara Kasa di Kota Santri tersebut selain akan memiliki bandar udara baru juga sekaligus difungsikan sebagai pusat latihan militer internasional pertama di Indonesia. Proyek berskala nasional ini menjadi bagian dari program strategis pertahanan dan pembangunan ekonomi daerah.

Bupati Rio juga menegaskan bahwa pembangunan ini tidak hanya menyasar kebutuhan militer, tetapi juga membuka peluang investasi, pariwisata, dan lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal. (mok,ads/dya)

DUNIA

Komandan Senior Hizbullah Tewas, Garda Revolusi Iran Ancam Israel

BEIRUT- Komandan militer Hizbullah, Haytham Ali Tabatabai, dilaporkan tewas dalam serangan udara Israel di Libanon. Garda Revolusi Iran (IRGC), sekutu utama Hizbullah, mengecam keras serangan tersebut dan memperingatkan bahwa balasan terhadap Tel Aviv tidak dapat dihindari.

Kematian Tabatabai dikonfirmasi oleh Hizbullah, Rabu (26/11/2025). Dikatakan Tabatabai tewas setelah serangan udara Israel menghantam wilayah pinggiran selatan Beirut pada Minggu (23/11/2025) waktu setempat.

Hizbullah mengenangnya sebagai seorang komandan militer penting dan pemimpin yang bekerja untuk



Pemakaman petinggi Hizbullah yang tewas akibat diserang Israel. (Al Jazeera)

menghadapi musuh Israel hingga saat-saat terakhir hidupnya yang penuh berkah.

Tabatabai menjadi komandan paling senior Hizbullah yang dibunuh Israel sejak gencatan senjata

November 2024 yang mengakhiri pertempuran selama lebih dari setahun.

Dalam pernyataan yang disampaikan melalui media pemerintah Iran, IRGC menyebut

serangan itu sebagai kejahatan biadab dan menegaskan bahwa Hizbullah serta seluruh poros perlawanan memiliki hak penuh untuk membalas kematian Tabatabai. IRGC juga memperingatkan bahwa Israel akan menghadapi respons yang menghancurkan pada waktu yang mereka tentukan.

Kementerian Luar Negeri Iran sebelumnya juga mengecam serangan tersebut, menyebutnya sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap gencatan senjata November 2024 dan pelanggaran brutal terhadap kedaulatan nasional Libanon.

Israel terus melakukan serangan di Lebanon sejak gencatan senjata diberlakukan, dengan alasan bahwa operasi mereka menargetkan petempur serta fasilitas militer Hizbullah.

Hizbullah, yang bergantung pada dukungan Iran, menghadapi tekanan besar akibat rangkaian konfrontasi terbaru dengan Israel. Situasi ikut diperburuk oleh runtuhnya rezim Bashar al-Assad di Suriah, sekutu utama Teheran dan Hizbullah. (rtr,afp/dya)

Kecanduan Video Pendek Sama Bahayanya dengan Alkohol, Ini Dampaknya ke Otak

Menonton video pendek kini menjadi kebiasaan yang menempel erat pada kehidupan digital masyarakat dunia. TikTok, Reels Instagram, YouTube Shorts, dan berbagai platform lain menyajikan banjir konten cepat berdurasi 15–90 detik, yang tiap hari ditonton miliaran kali oleh pengguna internet. Namun di balik selingan hiburan itu, penelitian terbaru mengungkapkan dampak mengkhawatirkan. Disebut kecanduan video pendek dinilai bisa merusak fungsi otak dan memicu gangguan kognitif yang bahkan disamakan dengan efek konsumsi alkohol.

Penelitian yang dipimpin profesor psikologi Tianjin Normal University, Qiang Wang, menyoroti perubahan struktur otak pada pengguna yang menghabiskan waktu panjang menonton video singkat setiap hari. Konten cepat, padat, dan penuh rangsangan visual membuat otak terbiasa mengejar kepuasan instan, yakni sensasi “ganjaran cepat” yang dipicu lonjakan dopamin. Kondisi ini menggeser cara kerja otak, menjauh dari proses berpikir yang mendalam dan bertahap.

“Kecanduan video pendek merupakan ancaman kesehatan masyarakat global,” ujar Wang. Ia mencatat, pengguna di China menghabiskan rata-rata 151 menit per hari menonton video pendek, dengan 95,5 persen pengguna internet terlibat di dalamnya. Konsumsi intensif ini tidak hanya mengganggu perhatian dan tidur, tetapi juga meningkatkan risiko gangguan mental seperti depresi.

Rentang Perhatian Melemah, Memori Menurun. Sejumlah riset menunjukkan bahwa paparan video pendek dalam durasi lama dapat menurunkan rentang perhatian, melemahkan kemampuan kognitif, hingga mengganggu memori jangka pendek. Fenomena ini disebut terjadi

karena otak dipaksa memproses informasi padat dalam waktu singkat secara terus-menerus.

Dr Praveen Gupta dari Marengo Asia Hospital menjelaskan, format video yang padat memberikan sensasi dopamin tinggi tanpa usaha besar. Otak mendapat stimulasi besar dalam waktu cepat, mirip dengan reaksi tubuh saat terpapar zat adiktif seperti nikotin atau alkohol.

“Seiring waktu, otak menjadi kurang menikmati rangsangan alami yang lebih lambat dan menuntut fokus mendalam. Ini bisa meningkatkan perilaku impulsif,” jelas Gupta.

Kondisi ini membuat pengguna terbiasa berpindah dari satu video ke video lain, mengejar sensasi baru setiap detik. Akibatnya, keterampilan untuk bertahan pada satu aktivitas dalam waktu panjang, seperti membaca buku, mengerjakan proyek kantor, hingga sekadar duduk tenang tanpa distraksi, mulai hilang.

Gangguan pada Korteks Prefrontal

Masalah lain muncul pada bagian otak yang disebut korteks prefrontal, yaitu pusat pengambilan keputusan, regulasi emosi, penilaian, dan pengelolaan informasi. Aktivitas menonton video disertai scrolling konstan menyebabkan otak bekerja

dalam mode “pergantian konteks” berulang kali. Otak dipaksa untuk terus memulai fokus baru dari nol.

Studi MRI menunjukkan bahwa penggunaan layar berlebihan pada remaja berkorelasi dengan penipisan korteks prefrontal. Kondisi ini mengkhawatirkan karena bagian otak tersebut baru selesai berkembang pada usia pertengahan 20-an. Artinya, paparan video pendek di usia muda dapat mempengaruhi arsitektur otak yang akan mereka bawa hingga dewasa.

Semakin sering kebiasaan ini berlangsung, semakin besar risiko yang ditanggung otak dalam jangka panjang.

Mengganggu Kontrol Perilaku

Yang mengejutkan, dampak pada otak akibat kecanduan video pendek disebut memiliki kemiripan mekanisme dengan gangguan akibat konsumsi alkohol. Neurosaintis yang terlibat dalam penelitian menemukan bahwa keduanya sama-sama melemahkan kemampuan otak menjaga konsentrasi, konsistensi berpikir, hingga kontrol perilaku.

“Transmisi sinaptik yang terganggu pada jalur neurotransmiter inilah yang juga ditemukan pada kecanduan alkohol dan nikotin,” tulis salah satu studi tersebut.

Gangguan sinaptik ini membuat otak semakin sulit mengatur alur pikir dan keputusan. Seseorang dapat merasakan aktivitas harian, seperti bekerja, belajar, atau menyimak percakapan, lebih cepat melelahkan daripada seharusnya.

Meski video pendek terbukti memberi manfaat, mulai dari edukasi cepat, hiburan, hingga peluang ekonomi kreatif, para ahli menegaskan bahwa konsumsi tanpa kendali bisa jadi ancaman jangka panjang. Bagi remaja dan anak

muda, risikonya lebih tinggi karena otak mereka masih berkembang. Bagi orang dewasa, risiko terutama berada pada melemahnya fokus, produktivitas, dan kemampuan berpikir mendalam. Para pakar menyarankan beberapa langkah sederhana untuk menekan dampaknya, seperti:

Mengatur durasi penggunaan harian

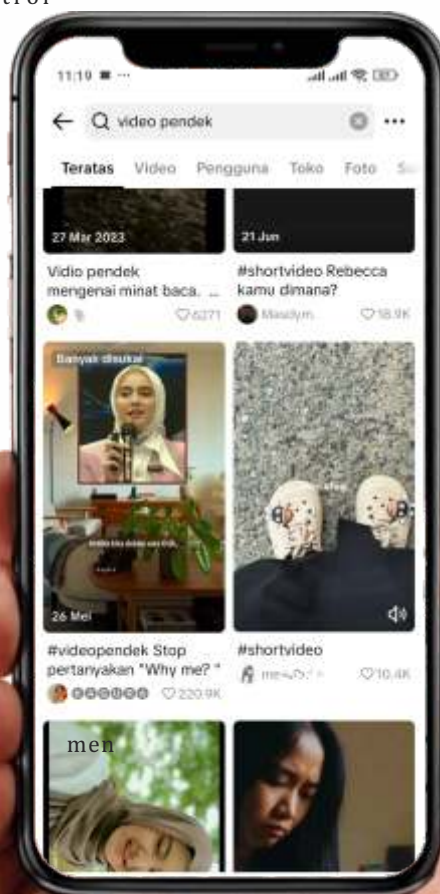
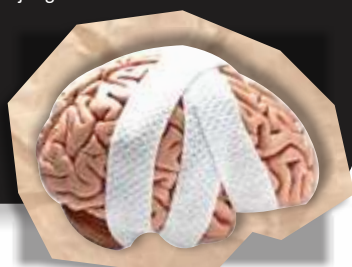
Menyalakan timer saat mulai menonton dapat membantu kita lebih sadar akan waktu yang dihabiskan di depan layar. Dengan batas waktu yang jelas, kita bisa mengontrol diri agar tidak terbawa suasana hingga menonton terlalu lama. Melepas gawai saat belajar atau bekerja juga penting untuk menjaga fokus. Menaruh ponsel jauh dari jangkauan atau mengaktifkan mode hening dapat membuat pekerjaan selesai lebih cepat dan hasilnya lebih maksimal. Selain itu, mengisi hari dengan aktivitas tanpa layar—seperti membaca buku, berolahraga, atau bersosialisasi secara langsung—dapat menjadi cara yang efektif untuk menyegarkan pikiran. (ist, tin/dya)

Dampak umum pada pengguna video pendek intensif

1. Kualitas tidur menurun karena otak terus meminta stimulasi sebelum beristirahat
2. Tingkat stres meningkat akibat banyaknya informasi yang harus diproses
3. Daya tahan mental melemah, memicu rasa lelah berkepanjangan
4. Risiko depresi bertambah, terutama jika otak terbiasa dengan stimulasi yang terlalu tinggi dan kehilangan kemampuan menikmati hal-hal sederhana

Dalam Kondisi Ektrem, Seseorang Dapat Kesulitan

1. Menunda kesenangan demi tujuan jangka panjang
2. Mengolah data yang kompleks
3. Menahan dorongan emosi
4. Menyimpan informasi baru



GEGERA MANUSIA, BUMI MIRING 80 CM DALAM 17 TAHUN TERAKHIR

Bayangkan Bumi sebagai gasing raksasa yang berputar dengan tenang di angkasa. Selama ribuan tahun, ia berputar dengan ritme yang stabil, menopang kehidupan di permukaan, menjaga musim dan iklim tetap seimbang. Namun, dalam 17 tahun terakhir, sesuatu yang mengejutkan telah terjadi. Bumi telah “miring” sejauh 80 sentimeter atau sekitar 31,5 inci. Perubahan ini, menurut para ilmuwan, bukanlah fenomena alami semata. Aktivitas manusia menjadi pendorong utama perubahan ini.

Fenomena ini, yang dikenal sebagai pergeseran kutub rotasi Bumi, ternyata terkait erat dengan pemompaan air tanah secara masif. Aktivitas manusia untuk mengairi lahan pertanian dan memenuhi kebutuhan sehari-hari ternyata meninggalkan jejak yang cukup besar pada planet.

Dampaknya pun nyata, permukaan laut naik sekitar 0,24 inci, dan sejumlah konsekuensi lain dari perubahan iklim semakin terasa.

Temuan ini dipaparkan dalam sebuah studi baru yang diterbitkan di jurnal *Geophysical Research Letters*. Para ilmuwan menekankan bahwa pemindahan air dari daratan ke lautan memiliki efek

yang jauh lebih signifikan daripada yang selama ini diperkirakan. Ki-Weon Seo, ahli geofisika dari Seoul National University dan pemimpin studi, menjelaskan dengan analogi sederhana namun kuat.

“Bayangkan Bumi sebagai gasing,” katanya. “Ketika kita memindahkan air dari satu tempat ke tempat lain, seperti menambahkan sedikit beban pada gasing yang berputar. Dampaknya membuat Bumi berputar sedikit berbeda.”

Fenomena ini memperlihatkan bahwa kutub rotasi Bumi memang selalu berubah, tetapi distribusi air tanah, aktivitas yang selama ini tampak sepele, ternyata memiliki pengaruh terbesar dibanding faktor iklim lainnya.

Studi ini menggunakan data dari tahun 1993 hingga 2010.

Dalam rentang waktu itu, manusia telah memompa sekitar 2.150 gigaton air tanah, sebagian

besar untuk irigasi dan kebutuhan domestik. Air yang dipompa ini, pada akhirnya, mengalir ke lautan, mengubah distribusi massa Bumi dan secara tak langsung mempengaruhi cara planet ini berputar.

Para peneliti memodelkan berbagai skenario pergeseran kutub rotasi Bumi. Dari sekian banyak model yang diuji, satu-satunya yang berhasil mereplikasi pergeseran yang diamati adalah model yang memasukkan data distribusi 2.150 gigaton air tanah. Temuan ini pun mendapat pujian dari Surendra Adhikari, ilmuwan peneliti di NASA's Jet Propulsion Laboratory, yang terlibat dalam studi serupa pada tahun 2016.

“Mereka telah mengukur peran pemompaan air tanah pada gerakan kutub, dan itu cukup signifikan,” ujarnya.

Lokasi pemindahan air juga menjadi faktor krusial. Pemindahan air dari garis lintang tengah memberi pengaruh terbesar. Pergerakan air intens dari Amerika Utara bagian barat dan India bagian barat laut terbukti memainkan peran kunci dalam kemiringan Bumi. Dengan kata lain, tindakan manusia di beberapa wilayah tertentu di dunia bisa menimbulkan efek global yang nyata. Pengetahuan ini bukan sekadar angka dan model komputer.

tentang distribusi air dan pergeseran kutub rotasi Bumi dapat menjadi alat penting bagi konservasionis dan pembuat kebijakan.

Dengan memahami bagaimana aktivitas manusia memengaruhi planet, mereka bisa merancang strategi untuk mengurangi dampak kenaikan permukaan laut dan ancaman perubahan iklim lainnya.

Seo menegaskan, “Memangamati perubahan kutub rotasi Bumi sangat berguna untuk memahami variasi penyimpanan air skala benua. Data ini memberi kita wawasan yang tak ternilai tentang bagaimana planet merespons interaksi manusia dengan lingkungannya.”

Apa yang terjadi pada Bumi ini, pada akhirnya, adalah pengingat bahwa setiap tindakan manusia, sekecil apa pun, memiliki konsekuensi. Ketika manusia mengalirkan air dari satu tempat ke tempat lain, kita tidak hanya mengubah lanskap di daratan, tetapi juga perlahan menggeser keseimbangan planet yang kita huni.

Perubahan kecil yang terus-menerus dapat berakumulasi menjadi dampak besar, memengaruhi iklim, ekosistem, hingga perilaku alam yang selama ini kita anggap stabil. Memahami hal ini adalah langkah pertama untuk hidup lebih selaras dengan Bumi, menjaga agar gasing raksasa yang menopang hidup tetap berputar dengan harmonis. Dengan kesadaran itu, kita dapat mulai mengambil pilihan-pilihan yang lebih bijak menggunakan sumber daya dengan lebih hati-hati, menghargai proses alam, dan menyadari bahwa kelestarian planet ini sangat bergantung pada keputusan yang kita buat setiap hari. (ist/dya)



HARIAN
LENTERA
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN “LENTERA TODAY”
PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)
REDAKTUR LUTFIYU HANDI, NEISKA OLIVIANA (CO)

KORAN DIGITAL LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)
download edisi digital pada web
www.lenteratoday.com
VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021



MEDIA TERVERIFIKASI

BIRO: SURABAYA: YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO I **GRESIK:** ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) I **MOJOKERTO:** NUR HIDAYAH I **LAMONGAN:** L HANDI I **BLITAR:** ARIEF SUKAPUTRA I **KEDIRI:** GATOT SUNARKO I **JOMBANG :** SUTONO I **PASURUAN-PROBOLINGGO-PONOROGO :** IMAN SANTOSO I **BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI:** PURCAHYONO JULIATMOKO I **MADIUN:** WIWIET EKO PRASETYO (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA) I **MALANG RAYA:** SANTI WAHYU SANIA (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA), ISKANDAR Z. I **MADURA RAYA:** SAHLAN KURNIAWAN I **TRENGGALEK:** TINA W I **NGAWI:** DIMAS RIDHO SURYO BASKORO I **DKI JAKARTA:** FUAD HASSAN I **LOMBOK BARAT:** MUHAYYAN I **PALANGKA RAYA:** NOVITA MASNIARI

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH I **MARKETING COMMUNICATION** JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN I **SEKERTARIS** FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILAH
DESAIN GRAFIS PAULUS IVAN I **ALAMAT REDAKSI** JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26 I **TELP** 03187854491 I **PENERBIT** PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA I **ALAMAT PERCETAKAN** SMILE GRAFIKA JL. RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA I **TELP IKLAN** 031-87854491 I **NIB** 91205006801134 I **HARGA IKLAN** RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal wartawan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal wartawan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

6 Kebiasaan Tanpa Disadari Membuat Pori-pori Wajah Membesar

Pori-pori wajah yang terlihat besar sering kali menjadi permasalahan kulit yang menurunkan rasa percaya diri. Banyak orang berupaya mengecilkan pori-pori melalui berbagai cara, mulai dari penggunaan produk perawatan kulit hingga menjalani perawatan di klinik kecantikan. Namun, tanpa disadari, beberapa kebiasaan kecil dalam rutinitas sehari-hari justru dapat memperburuk kondisi

Ada enam kebiasaan yang secara tidak disadari dapat membuat pori-pori tampak lebih besar, sebagaimana dikutip dari Erufucare dan Primary Skin.

Terlalu Sering Menggunakan Produk Pengontrol Minyak

Banyak yang beranggapan bahwa semakin kuat efek kontrol minyak dari suatu produk, maka semakin baik untuk kulit berminyak. Padahal, penggunaan berlebihan justru dapat menghilangkan kelembapan alami kulit.

Ketika kulit kehilangan kelembapannya, kelenjar sebacea akan memproduksi lebih banyak minyak sebagai kompensasi, sehingga wajah tampak semakin berminyak dan pori-pori terlihat lebih besar.

Gunakanlah produk pengontrol minyak secara wajar dan imbangi dengan pelembap bertekstur ringan agar keseimbangan kelembapan kulit tetap terjaga. Dengan cara ini, kulit akan tetap lembap tanpa membuat pori-pori tampak semakin jelas.

Mencuci Wajah dengan Air yang Terlalu Panas atau Terlalu Dingin

Banyak orang percaya bahwa air panas dapat membuka pori-pori dan air dingin dapat menutupnya. Faktanya, pori-pori tidak memiliki otot sehingga tidak dapat membuka atau menutup. Penggunaan air bersuhu ekstrem justru dapat menyebabkan iritasi dan mengganggu keseimbangan minyak alami kulit.

Sebaiknya, gunakan air bersuhu hangat kuku saat mencuci wajah. Suhu ini cukup efektif untuk membersihkan kotoran tanpa menyebabkan kulit menjadi kering atau perih, serta membantu menjaga tekstur kulit tetap halus.

Kebiasaan Memencet Jerawat atau Komedo

Meskipun terasa memuaskan, memencet jerawat atau komedo hanya memberikan hasil sementara. Tekanan pada kulit dapat merusak dinding pori-pori dan memicu peradangan, yang pada akhirnya membuat pori-pori tampak lebih besar.

Alih-alih memencet, sebaiknya gunakan produk perawatan dengan bahan aktif seperti asam salisilat atau retinoid yang dapat membantu membersihkan pori-pori dari

dalam secara aman tanpa meninggalkan luka atau bekas.

Menggunakan Produk dengan Kandungan Komedogenik

Beberapa bahan seperti minyak kelapa, cocoa butter, atau lanolin memiliki sifat melembapkan, tetapi juga dapat menyumbat pori-pori dan menimbulkan komedo jika digunakan terus-menerus. Penumpukan bahan-bahan tersebut dapat membuat pori-pori tampak semakin besar.

Pilihlah produk yang berlabel non-komedogenik, dengan kandungan minyak ringan seperti jojoba oil, almond oil, atau rosehip oil. Bahan-bahan ini tetap mampu menjaga kelembapan kulit tanpa menyebabkan penyumbatan pada pori-pori.

Tidak Membersihkan Riasan dengan Sempurna

Membersihkan wajah hanya menggunakan sabun wajah tidak cukup untuk mengangkat sisa makeup dan tabir surya secara menyeluruh. Residu produk yang tertinggal dapat menumpuk di dalam pori-pori dan memicu munculnya komedo maupun peradangan kulit.

Untuk hasil optimal, terapkan metode double cleansing, dimulai dengan cleansing oil atau micellar water, kemudian dilanjutkan dengan facial wash yang lembut. Metode ini membantu memastikan kulit benar-benar bersih dari sisa kosmetik dan kotoran.

Sering Mengonsumsi Makanan Tinggi Gula

Konsumsi makanan dengan kadar gula tinggi dapat meningkatkan kadar insulin dalam tubuh, yang kemudian memicu hormon IGF-1.

Hormon ini merangsang produksi sebum berlebih, membuat kulit tampak lebih berminyak dan pori-pori menjadi lebih terlihat.

Cobalah untuk membatasi makanan manis dan

menggantinya dengan sumber karbohidrat kompleks seperti buah-buahan segar atau oat. Selain membantu menjaga kesehatan kulit, pola makan ini juga bermanfaat untuk menyeimbangkan kadar hormon dalam tubuh. (tin,ist/dya)

Tips membuat toner alami pengecil pori-pori

Bahan:

1. 1 buah timun
2. Air beras
3. 3 potong jeruk nipis

Langkah-langkah membuatnya

1. Parut timun hingga halus, kemudian peras dan saring untuk mendapatkan airnya.
2. Simpan air timun yang telah disaring tersebut.
3. Selanjutnya, rebus empat sendok makan beras dengan jumlah air yang cukup hingga mendidih, lalu tiriskan beras dan ambil air rebusannya.
4. Campurkan air timun dengan air rebusan beras dengan perbandingan 1:2.
5. Setelah itu, tambahkan air perasan jeruk nipis ke dalam campuran tersebut dan aduk hingga semua bahan tercampur merata.
6. Toner alami siap digunakan.

Cara menggunakan:

Disarankan untuk menggunakan toner ini agar hasilnya lebih optimal setelah mandi atau sebelum mengaplikasikan makeup. Dengan menggunakan kapas, usap toner pada wajah yang telah dibersihkan untuk menghilangkan sisa-sisa kotoran yang mungkin masih menempel.

Terbelahnya Nahdlatul Ulama ...dari hal 1

Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menolak melepaskan jabatan Ketua Umum PBNU meski telah keluar surat edaran soal statusnya yang tak lagi menjabat posisi tersebut. Gus Yahya menyebut surat edaran yang beredar hari ini tidak sah.

"Soal dokumen surat edaran bahwa surat itu tidak sah, masih ada watermark dengan tulisan draf," kata Gus Yahya di kantor PBNU, Kramat Raya Jakarta Pusat, Rabu (26/11/2025), merespons surat edaran tersebut.

Gus Yahya menyatakan surat edaran tersebut tidak memenuhi standar administrasi PBNU. Salah satunya, surat tersebut tidak ditandatangani oleh empat orang di Syuriah (pimpinan tertinggi) dan Tanfidziyah (badan pelaksana).

"Bahwa surat itu tidak ditandatangani 4 orang Syuriah dan Tanfidziyah. Apabila dicek link di bawah surat akan diketahui nomor surat di situ tidak dikenal. Sehingga surat itu memang tidak memenuhi ketentuan. Dengan kata lain, tidak sah dan tidak mungkin digunakan sebagai dokumen resmi," imbuhnya.

Ia kembali menegaskan tidak bisa dimundurkan kecuali lewat forum muktamar. "Saya menyatakan tidak akan mundur dan tidak bisa diberhentikan kecuali melalui muktamar," ujarnya.

Senada, Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Amin Said Husni, membantah keputusan rapat harian Syuriah yang memutuskan Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya tidak lagi berstatus Ketua Umum. Menurut Amin Said, surat yang beredar dengan menggunakan kop surat PBNU Nomor 4785/PB.02/A.II.10.01/99/11/2025, bukan merupakan dokumen resmi organisasi.

Dalam penjelasan tersebut ditegaskan bahwa dokumen yang beredar tidak memenuhi ketentuan administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pedoman Administrasi, khususnya terkait keabsahan surat resmi PBNU.

Ia menjelaskan bahwa sistem persuratan PBNU kini telah dilengkapi mekanisme keamanan berlapis, termasuk stempel digital Peruri dengan QR Code di bagian kiri bawah surat, serta footer resmi yang menyatakan bahwa dokumen ditandatangani secara elektronik oleh Digdaya Persuratan dan distempel digital oleh Peruri Tera. Dokumen yang beredar diketahui tidak memenuhi standar tersebut.

Selain itu, surat yang beredar memuat watermark "DRAFT", yang

menandakan bahwa dokumen tersebut bukan surat final dan karenanya tidak memiliki kekuatan administrasi. Pemindaian QR Code pada surat tersebut juga menunjukkan status "TTD Belum Sah", sehingga tidak dapat diakui sebagai dokumen resmi PBNU.

Lebih jauh, saat nomor surat itu diverifikasi melalui laman resmi verifikasi.nu.id/surat, sistem memberikan keterangan "Nomor Dokumen tidak terdaftar", sehingga mempertegas bahwa surat tersebut tidak valid dan tidak terdapat dalam basis data resmi PBNU.

Amin Said mengimbau seluruh jajaran pengurus serta warga Nahdlatul Ulama di semua tingkatan untuk tetap tenang dan selalu memeriksa keaslian dokumen yang mengatasnamakan PBNU melalui saluran resmi.

Pengurus Diminta Rapat Pleno

Surat edaran terbaru yang beredar terbaru itu yang isinya menyatakan bahwa Gus Yahya tidak lagi menjabat Ketua Umum PBNU.

Surat edaran itu merupakan tindak lanjut dari rapat harian Syuriah PBNU, 20 November lalu di Jakarta yang meminta Gus Yahya mundur dari kursi ketua umum dalam waktu tiga hari sejak diterimanya keputusan rapat harian Syuriah.

Jika dalam waktu tiga hari tidak mengundurkan diri, rapat harian Syuriah PBNU memutuskan memberhentikan Yahya Cholil Staquf.

Surat edaran terbaru ini bercap tandatangan elektronik Wakil Rais Aam Afifuddin Muhajir dan Katib Ahmad Tajul Mafakhir.

"B a h w a b e r d a s a r k a n pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir 2 di atas, maka KH. Yahya Cholil Staquf tidak lagi berstatus sebagai Ketua Umum PBNU terhitung mulai 26 November 2025 pukul 00.45 Wib," bunyi butir 3 dari surat edaran tersebut.

Pada butir selanjutnya dinyatakan Yahya Cholil Staquf tidak lagi memiliki wewenang dan hak untuk menggunakan atribut, fasilitas, dan/atau hal-hal yang melekat kepada jabatan Ketua Umum PBNU.

Kemudian Gus Yahya juga tidak punya wewenang dan hak untuk bertindak atas nama Perkumpulan Nahdlatul Ulama terhitung mulai tanggal 26 November pukul 00.45 Wib.

Butir selanjutnya memerintahkan agar pengurus menggelar rapat pleno untuk menindaklanjuti pergantian pengurus PBNU.

Kemudian di bagian penutup disebutkan bahwa selama kekosongan jabatan ketua umum PBNU, maka kepemimpinan PBNU

sepenuhnya berada di tangan Rais Aam selaku pimpinan tertinggi Nahdlatul Ulama.

"Dalam hal KH. Yahya Cholil Staquf memiliki keberatan terhadap keputusan tersebut, maka dapat menggunakan hak untuk mengajukan permohonan kepada Majelis Tahkim Nahdlatul Ulama sesuai dengan mekanisme yang telah diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 14 tahun 2025 tentang Penyelesaian Perselisihan Internal," demikian bagian penutup surat edaran.

Ahmad Tajul membenarkan telah menandatangani surat itu. Namun, dirinya membantah surat itu merupakan surat pemberhentian. Dia berkata surat itu sekedar surat edaran. "Saya tanda tangan Surat Edaran PBNU soal sebagaimana yang tertulis di surat tersebut. Bukan Surat Pemberhentian. Beda bentuknya," ujar dia saat dimintai konfirmasi pada Rabu, 26 November 2025.

Dia mengatakan proporsi tanggapannya sebagai pribadi bukan mewakili lembaga. "Faktornya saya pribadi. Saya pribadi bertanggung jawab penuh atas apa yang saya katakan. Bukan organisasi. Saya bukan juru bicara PBNU soalnya," ujar dia.

Sebelumnya, Syuriah PBNU telah mengeluarkan kesimpulan rapat yang mendesak Gus Yahya mundur pada 20 November 2025. Dari 53 pengurus harian Syuriah, sebanyak 37 orang hadir dalam rapat yang mempersoalkan keterlibatan narasumber berafiliasi jaringan zionisme internasional dalam kegiatan Akademi Kepemimpinan Nasional NU (AKN NU). Kehadiran narasumber itu dinilai bertentangan dengan nilai Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah serta Muqaddimah Qanun Asasi NU.

Bak Mengulang Kisruh Cipayang

Gejolak internal PBNU bukan kali pertama terjadi. Upaya pemakzulan terhadap Ketua Umum PBNU juga terjadi saat muktamar di Cipasang, Tasikmalaya, Jawa Barat, pada 1994. Saat itu pemerintah hendak mendongkel Abdurrahman Wahid alias Gus Dur dari jabatan Ketua Umum PBNU periode 1984-1999 dengan alasan tata kelola dan gaya kepemimpinan Gus Dur.

Dilansir laman nu.or.id, Presiden ke-2 Soeharto disebut memunculkan penantang dari internal NU yang anti-Gus Dur, yakni Abu Hasan. Tak hanya itu, paman Gus Dur, KH Yusuf Hasyim, juga ikut menentang keponakannya itu.

Kelompok Abu Hasan mengemukakan kritik bahwa manajemen NU di bawah kepemimpinan Gus Dur lemah dan otokratik. Bahkan, menurut mereka, langkah Gus Dur yang kerap kali berseberangan dengan pemerintah dianggap bukan hanya menyimpang

dari khittah NU, tetapi juga bertentangan dengan kepentingan NU sendiri. Kampanye ABG alias Asal Bukan Gus Dur pun didengungkan untuk menjegal Gus Dur.

Gelaran muktamar kala itu juga terkungkung penjagaan militer. Saat itu, pejabat rezim Orde Baru turut hadir dalam forum tertinggi organisasi Islam terbesar tersebut, mulai dari Presiden Soeharto, Panglima TNI Jenderal Faisal Tandjung, hingga para menteri. Dari berbagai sumber, setidaknya ada 1.500 personel tentara dan 100 intel yang berjaga di sekitar Cipasang. Beberapa dari mereka bahkan diketahui menyamar dengan seragam Barisan Ansor Serbaguna atau Banser. (wid,ist,kcm/dya)

DERETAN POLEMIK YANG MELIBATKAN GUS YAHYA

Undangan Akademikus Zionis (Peter Berkowitz)

- Undangan terhadap Peter Berkowitz ke Akademi Kepemimpinan Nasional NU memicu gelombang protes.
- Syuriah menilai narasumber "berafiliasi dengan jaringan zionisme internasional", melanggar prinsip Aswaja & muqaddimah qanun asasi NU.
- Dianggap mencemarkan nama baik PBNU dan melanggar Peraturan NU No. 13/2025.
- Gus Yahya mengaku lalai dan meminta maaf.

Isu Keterkaitan dengan Zionisme

- Kritikan muncul karena rekam jejak Yahya pernah bertemu PM Israel Netanyahu (2018).
- Ia membantah memiliki afiliasi pro-zionis dan menegaskan kunjungannya untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina.

Petisi Pencopotan dari MWA UI

- Mahasiswa UI membuat petisi agar Yahya dicopot dari Majelis Wali Amanat UI (periode 2024-2029).
- Alasan: undangan terhadap akademikus pro-Zionis di acara UI 23 Agustus 2025.
- UI SJP menilai rekam jejak Yahya "tidak sejalan dengan nilai UI".

4. Sikap soal Israel-Palestina & Dukungan terhadap Pernyataan Prabowo

- Gus Yahya mendukung pernyataan Presiden Prabowo: Indonesia siap membuka hubungan diplomatik dengan Israel jika Palestina merdeka.
- Pernyataan ini memicu kontroversi dari aktivis & politisi.

5. Polemik dengan Pansus Haji DPR (2024)

- Yahya mengkritik pembentukan Pansus Angket Haji 2024, menyebutnya upaya politisasi terhadap PBNU.
- Ia menilai pansus itu terkait posisi adiknya, Menag Yaqut Cholil Qoumas.

7. Pertemuan dengan Jokowi Saat Aksi Besar 2024

- Yahya bertemu Presiden Jokowi di Istana (22 Agustus 2024), saat ribuan massa berdemo di DPR soal putusan MK.
- Pertemuan membahas rencana PBNU mengelola konsesi tambang batubara 26.000 hektar di Kaltim.
- Langkah ini dinilai tidak sensitif terhadap situasi politik dan gelombang protes.

IRA PUSPADEWI MASIH DITAHAN

Rehabilitasi Sudah Diumumkan tapi Keppres Belum Diterima KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga Rabu (26/11/2025) pukul 21.00 WIB belum menerima salinan Keputusan Presiden (Keppres) terkait rehabilitasi eks Direktur Utama PT ASDP Ira Puspawati dan kawan-kawannya. Tiga orang yang terlibat dalam perkara korupsi terkait kerja sama usaha (KSU) dan proses akuisisi PT Jembatan Nusantara (PT JN) pada periode 2019–2022 itupun masih ditahanan. Diketahui, secara lisan rehabilitasi yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto sudah diumumkan sejak kemarin malam.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menunggu salinan Keputusan Presiden (Keppres) terkait rehabilitasi eks Direktur Utama PT ASDP Ira Puspawati dan kawan-kawannya.

"Sampai saat ini KPK masih menunggu surat keputusan rehabilitasi dari Presiden," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu (26/11/2025).

Budi menjelaskan salinan Keppres terkait rehabilitasi itu akan menjadi dasar bagi pimpinan KPK untuk menindaklanjuti rehabilitasi tersebut.

"Sehingga kami masih menunggu surat tersebut untuk kemudian bisa melaksanakan tindak lanjutnya," ujarnya.

Budi memastikan KPK akan mengumumkan jika sudah menerima salinan Keppres tersebut.

"Nanti akan kami infokan kembali jika kami sudah mendapatkan surat tersebut. Tentu ketika KPK sudah menerima, kami akan memproses," ucapnya.

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto memberikan rehabilitasi kepada mantan Direktur Utama PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry (Persero), Ira Puspawati.

Selain Ira, dua terdakwa lain dalam kasus korupsi di ASDP yang dijerat Ira, Muhammad Yusuf Hadi dan Harry Muhammad Adhi Caksono, juga diberikan rehabilitasi.

"Setelah DPR RI menerima berbagai aspirasi dari masyarakat, kelompok masyarakat, kami kemudian meminta ke komisi hukum untuk melakukan kajian terhadap penyelidikan yang mulai dilakukan sejak Juli 2024," ujar Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Istana, Jakarta, Selasa (25/11/2025).

"Dari hasil komunikasi dengan pihak pemerintah, alhamdulillah pada hari ini Presiden RI Prabowo Subianto telah menandatangani surat rehabilitasi terhadap 3 nama tersebut," imbuhnya.

Sebelumnya, mantan Direktur Utama PT Angkutan Sungai, Danau,



Selain Ira Puspawati, Prabowo Subianto memberikan rehabilitasi terhadap dua mantan Direktur PT ASDP dalam kasus dugaan korupsi KSU dan akuisisi PT JN. (ANTARA)

dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry (Persero), Ira Puspawati, dijatuhi vonis 4,5 tahun penjara. Ira Puspawati dinyatakan bersalah dalam perkara korupsi terkait kerja sama usaha (KSU) dan proses akuisisi PT Jembatan Nusantara (PT JN) pada periode 2019–2022.

"Mengadili, menjatuhkan pidana kepada terdakwa Ira Puspawati dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan penjara, dan denda Rp 500 juta subsidir 3 bulan penjara," kata Hakim Ketua Sunoto, saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan

MA Sebut Proses Hukum Kasus Tak Terganggu

MAHKAMAH Agung (MA) bicara soal rehabilitasi yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto terhadap eks Dirut ASDP Ira Puspawati dan dua eks direksi ASDP Muhammad Yusuf Hadi dan Harry Muhammad Adhi Caksono.

Juru bicara MA Yanto mengatakan, rehabilitasi yang diberikan oleh Prabowo merupakan hak istimewa yang diberikan oleh UUD tepatnya Pasal 14 ayat (1).

Berikut bunyi pasal itu: Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.

"Jadi itu hak istimewa yang diberikan kepada presiden, tentunya dengan pertimbangan yang lebih besar, untuk kepentingan yang lebih besar tentunya, kan seperti itu," kata Yanto dalam konferensi pers di kantornya, Rabu (26/11/2025).

"Barang kali kepentingan lebih besar, kepentingan nasional, kan seperti itu, itu hak istimewa yang diberikan kepada presiden oleh konstitusi kita itu pasal 14 ayat 1," sambungnya.

Lantas apakah pemberian rehabilitasi dari presiden ini akan mengganggu proses hukum yang tengah berjalan?

"Ya ndak akan ganggu, ya, proses hukum berjalan hak istimewa berjalan, tidak ada masalah, ndak akan mengganggu karena tentunya presiden itu tidak sembarangan memberikan," kata Yanto.

"Tentunya akan melihat ke depan ini untuk kepentingan bangsa negara yang lebih besar tentunya hak istimewa. Sehingga antara putusan pengadilan dan rehabilitasi enggak akan mengganggu hal biasa terjadi dalam ketatanegaraan kita,"

Negeri Jakarta Pusat, dikutip pada Selasa (25/11/2025).

Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi yakni 8,5 tahun penjara.

Majelis hakim menilai, Ira terbukti memperkaya pemilik PT JN, Adjie, senilai Rp 1,25 triliun melalui proses akuisisi PT JN oleh PT ASDP.

Meski terbukti memperkaya orang lain atau korporasi, Ira dinilai tidak menerima keuntungan pribadi sehingga tidak dikenakan pidana berupa uang pengganti. (wid,kum/dya)

KASUS KORUPSI KSU & AKUISISI PT JEMBATAN NUSANTARA (2019-2022)

1. Akar Kasus:

KSU & Akuisisi PT JN (2019–2022)

- Proses Kerja Sama Usaha (KSU) dan akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP.
- Menurut hakim, akuisisi dilakukan dengan nilai yang terlalu mahal (overpriced).
- Kerugian negara yang dihitung: Rp1,25 triliun.

2. Terdakwa Utama

- Ira Puspawati – Mantan Dirut PT ASDP.
- Muhammad Yusuf Hadi – Pejabat terkait.
- Harry Muhammad Adhi Caksono – Pejabat terkait.

3. Tuntutan Jaksa KPK

- Tuntutan: 8,5 tahun penjara.
- Denda: Rp500 juta subsidir 4 bulan kurungan.

4. Vonis Hakim Lebih Ringan

- Putusan: 4 tahun 6 bulan penjara.
- Denda: Rp500 juta subsidir 3 bulan.
- Hakim menilai kerugian negara terjadi melalui skema akuisisi yang menguntungkan pemilik PT JN.

5. Dissenting Opinion Hakim Ketua

- Ketua majelis, Sunoto, berpendapat: - Perkara ini harusnya lepas dari tuntutan hukum (OVAR).
- Kasus dinilai ranah perdata, masuk Business Judgement Rule, bukan korupsi.

6. Intervensi Presiden: Rehabilitasi

- 5 hari setelah vonis, Presiden Prabowo Subianto menandatangani surat rehabilitasi untuk Ira Puspawati.
- Status hukum dan nama baik Ira dipulihkan.

sambungannya.

Adapun rehabilitasi yang diberikan terhadap Ira dkk ini merupakan hasil masukan masyarakat terkait proses hukum yang dijalankan.

Sementara, pengamat hukum pidana dari UPH, Jamin Ginting, menilai hal itu menunjukkan adanya kekeliruan dalam putusan pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor).

"Hal ini menunjukkan apa yang diputuskan tipikor terjadi suatu kekeliruan," tuturnya.

"Ini bukan pertama kali KPK mengajukan penyelidikan dianulir, artinya putusan tipikor tidak tepat," tegasnya.(wid,kcm,ist/dya)